

**Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Surakarta sebagai Pilar dalam Mewujudkan Keadilan Sosial yang Inklusif**

Oktaviana Ayu Sekar Astuti<sup>1</sup>, Anita Firdausi<sup>2</sup>, Tiara Yogi Dwi Amelia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: [Oktayusekar.93@gmail.com](mailto:Oktayusekar.93@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: [Maxwinn969@gmail.com](mailto:Maxwinn969@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: [Tiarayogjee@gmail.com](mailto:Tiarayogjee@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p><b>Keywords</b> community empowerment, social justice, inclusion, poverty, Surakarta</p>	<p>Poverty remains a multidimensional structural issue that poses a major challenge in the city of Surakarta. Despite various empowerment programs initiated by the local government, their effectiveness is limited by weak cross-sectoral integration, inadequate unified data, and the minimal involvement of the poor as active development agents. This study aims to analyze the effectiveness of poverty alleviation programs in realizing inclusive social justice in Surakarta. Using a qualitative case study approach, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in several high-poverty urban villages. The findings reveal that participatory community-based approaches, integrated data systems, and cross-sectoral collaboration are crucial to improving program outcomes. Nonetheless, challenges remain, such as weak mentoring, misalignment between programs and local needs, and inequitable access to basic services. Therefore, the empowerment of the poor should be framed as the fulfillment of fundamental citizen rights rather than mere technocratic intervention. This research recommends the establishment of inclusive, data-driven policy systems that strengthen community capacity to achieve a dignified and prosperous life.</p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel</b></p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p><b>Kata Kunci</b> pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial, inklusi, kemiskinan, Surakarta</p>	<p>Kemiskinan merupakan isu struktural multidimensi yang masih menjadi tantangan serius di Kota Surakarta. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dijalankan oleh pemerintah, efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data terpadu, dan minimnya partisipasi masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif di Surakarta. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di beberapa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif, penggunaan data yang terintegrasi, dan kolaborasi lintas sektor merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan seperti lemahnya pendampingan, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta ketimpangan dalam distribusi layanan dasar. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin harus diposisikan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, bukan sekadar intervensi teknokratis. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya sistem kebijakan yang berbasis data, inklusif, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam meraih kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.</p>

**A. Pendahuluan**

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang krusial di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Surakarta. Meskipun Surakarta dikenal sebagai kota yang progresif dalam bidang sosial dan budaya, tantangan pengentasan kemiskinan belum dapat teratasi secara tuntas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), tingkat kemiskinan di Surakarta pada tahun 2024 mencapai 8,31% atau sekitar 43.280 jiwa, hanya mengalami sedikit penurunan dari angka 8,44% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini belum mencerminkan transformasi substantif dalam pemberdayaan masyarakat miskin secara menyeluruh.

Kemiskinan di Surakarta tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Kelompok rentan sering kali mengalami marginalisasi dalam proses perumusan kebijakan, baik dalam konteks perencanaan maupun evaluasi program (BRIDA Surakarta, 2022). Ketimpangan ini memperkuat argumentasi bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan sektoral dan jangka pendek semata.

Pemerintah Kota Surakarta telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha mikro, dan program padat karya. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak program berhenti pada tahap distribusi bantuan tanpa diiringi mekanisme pendampingan dan monitoring yang memadai (Kompas.com, 2025). Lemahnya integrasi lintas sektor antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan efektivitas program cenderung rendah dan kurang menjawab kebutuhan lokal masyarakat miskin secara komprehensif.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta No. 18 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya sinergi dan perencanaan partisipatif antar OPD untuk membentuk sistem intervensi terpadu (BPK RI, 2022). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menemui kendala dalam kapasitas kelembagaan, keterbatasan data terpadu, serta rendahnya pelibatan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara idealisme kebijakan dan kenyataan di lapangan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang efektif membutuhkan penggunaan data yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan sasaran. Kementerian Sosial RI telah menggarisbawahi pentingnya sistem satu data dalam penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari duplikasi penerima manfaat (Solopopuler.com, 2025). Kota Surakarta, dalam konteks ini, masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem basis data kemiskinan yang responsif dan dinamis.

Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan juga memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Model evaluasi seperti *Context, Input, Process, Product* (CIPP) banyak digunakan untuk menilai efektivitas program OPD, namun hasilnya masih menunjukkan bahwa banyak program belum tepat sasaran atau tidak sesuai dengan konteks sosial ekonomi masyarakat lokal (Wulandari, 2023). Hal ini menandakan perlunya pendekatan evaluatif yang lebih adaptif terhadap keragaman karakteristik kemiskinan di Surakarta.

Salah satu pendekatan yang inovatif adalah metode *Rappoverty*, yang mampu memetakan kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, dan psikologis. Studi oleh Suryani et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan dalam mengidentifikasi kerentanan multidimensi dan dapat menjadi dasar untuk desain program pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Studi oleh Nurhidayat (2022) mencontohkan bagaimana dana zakat yang dikelola secara profesional oleh LAZISMU dan PDM Kota Surakarta berhasil memberdayakan pelaku UMKM melalui model pendampingan bisnis dan pelatihan. Pendekatan berbasis komunitas ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi mikro dapat menjadi strategi alternatif dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Program fisik seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan hunian yang layak (Kompas.com, 2022). Namun, jika tidak diiringi dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi, dampaknya tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi fisik perlu dikombinasikan dengan pendekatan penguatan kapasitas masyarakat.

Surakarta memiliki sejarah panjang dalam inovasi sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota ini pernah menjadi rujukan nasional dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, terdapat potensi besar bagi Surakarta untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat miskin yang berbasis keadilan sosial dan inklusivitas (Bappeda Surakarta, 2022). Model ini menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek intervensi kebijakan.

Dalam kerangka hak asasi manusia, kemiskinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar warga negara, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Fauzi & Nugroho, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin harus dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak, bukan semata-mata bentuk amal atau bantuan.

Program pemberdayaan harus menempatkan prinsip inklusi sosial sebagai basis desain dan pelaksanaannya. Partisipasi kelompok miskin dalam seluruh tahapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas program. Selain itu, proses ini akan memperkuat kapasitas masyarakat miskin untuk menjadi aktor pembangunan yang mandiri dan berdaya (Kurniawan, 2021).

Di sisi lain, banyak penelitian sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas program secara administratif, tanpa mengevaluasi persepsi dan pengalaman masyarakat penerima manfaat. Inilah yang menjadi celah yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Kajian ini ingin menempatkan perspektif masyarakat sebagai titik tolak dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang relevan secara sosial dan kontekstual.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat miskin sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan melalui evaluasi program pemberdayaan yang sedang berjalan dan identifikasi hambatan serta peluang di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih akomodatif terhadap realitas lokal dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Surakarta mampu berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif, serta apa saja hambatan dan potensi strategis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif di Kota Surakarta. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi kontekstual terhadap fenomena kemiskinan dan pemberdayaan dalam kondisi sosial yang nyata (Yin, 2020). Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di beberapa kelurahan dengan angka kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS Kota Surakarta (2024), seperti Kelurahan Semanggi, Mojo, dan Gilingan.

Prosedur penelitian dilakukan dalam tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan analisis. Tahap perencanaan dimulai dengan studi dokumentasi terhadap kebijakan pemberdayaan dan data kemiskinan dari BPS, BRIDA, dan Dinas Sosial Kota Surakarta. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui teknik *triangulasi metode*, yakni observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menangkap dinamika implementasi program pemberdayaan secara langsung di masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci seperti perwakilan OPD (misalnya Dinsos dan Bappeda), pelaksana program, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling* untuk memperoleh informasi yang kaya dan relevan (Creswell & Poth, 2021).

Akuisisi data dilakukan selama dua bulan, dengan penekanan pada pengumpulan data primer melalui *semi-structured interviews*. Format ini dipilih agar peneliti dapat menjaga alur pertanyaan utama sekaligus memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara kontekstual pengalaman dan persepsinya (Guest, Namey, & Mitchell, 2020). Selain itu, data sekunder seperti laporan evaluasi program, dokumen kebijakan, dan data statistik digunakan untuk mendukung triangulasi dan memperkuat validitas internal.

Dalam tahap analisis data, peneliti menggunakan metode *thematic analysis* yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2021), dengan langkah-langkah yang mencakup familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan ulang tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan analisis. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak kualitatif (NVivo 12) guna membantu pengelompokan data berdasarkan tema yang relevan seperti bentuk intervensi, tingkat partisipasi, efektivitas kebijakan, serta hambatan struktural. Validitas data dijaga melalui teknik *member checking* dan *peer debriefing*.

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan empat kriteria dari Lincoln dan Guba (1985) yang masih relevan dalam praktik kualitatif kontemporer, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Kredibilitas diperoleh melalui triangulasi metode dan sumber, transferabilitas diperkuat dengan deskripsi konteks yang rinci, sedangkan dependabilitas dan konfirmabilitas dicapai

melalui pencatatan audit trail dan catatan lapangan yang sistematis. Selain itu, keikutsertaan peneliti dalam kegiatan masyarakat lokal selama proses penelitian juga membantu dalam memperkuat interpretasi hasil (Nowell et al., 2017).

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi lokasi dan informan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen wawancara dan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan proses transkripsi, pengkodean, dan analisis tematik. Hasil analisis kemudian divalidasi dan disusun dalam bentuk narasi analitik yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Prosedur yang sistematis ini memungkinkan integrasi antara pendekatan empiris dan reflektif dalam satu kerangka kerja yang koheren.

Dengan rancangan metodologi yang berbasis pendekatan partisipatif dan berorientasi kontekstual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin di Surakarta. Selain itu, metodologi ini juga mendukung terciptanya rekomendasi berbasis bukti yang aplikatif dan relevan untuk pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**C. Hasil dan Pembahasan**

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Surakarta dalam mewujudkan keadilan sosial yang inklusif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Surakarta sebesar 8,31%, menurun 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 43.280 jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp638.102 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2024).

Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin sebesar 9,58% pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,40 juta jiwa dan garis kemiskinan sebesar Rp521.093 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024). Sementara itu, DKI Jakarta mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,14% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 449.070 jiwa dan garis kemiskinan sebesar Rp846.085 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
Kota Surakarta	8,31	43.280	638.102
Provinsi Jawa Tengah	9,58	3.400.000	521.093
DKI Jakarta	4,14	449.070	846.085

Tabel 1 Perbandingan Data Kemiskinan Tahun 2024.

Sumber : Hasil Olah Data di Lapangan

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya variasi tingkat kemiskinan yang cukup signifikan di antara Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan DKI Jakarta pada tahun 2024. Kota Surakarta mencatat persentase penduduk miskin sebesar 8,31% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 43.280 jiwa dan garis kemiskinan Rp638.102 per kapita per bulan. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan persentase kemiskinan tertinggi yakni sebesar 9,58% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.400.000 jiwa dan garis kemiskinan lebih rendah sebesar Rp521.093. Di sisi lain, DKI Jakarta menunjukkan angka persentase kemiskinan yang paling rendah yaitu 4,14%, namun dengan garis kemiskinan tertinggi sebesar Rp846.085 per kapita per bulan.

Variasi ini mencerminkan relevansi dari teori kemiskinan struktural, sebagaimana dijelaskan dalam kajian teoretis, bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan individu, tetapi juga

oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Garis kemiskinan yang lebih tinggi di DKI Jakarta menandakan standar hidup yang juga lebih tinggi, sehingga meskipun jumlah dan persentase penduduk miskin relatif lebih rendah, beban biaya hidup jauh lebih besar. Sebaliknya, Provinsi Jawa Tengah dengan garis kemiskinan yang lebih rendah menunjukkan bahwa meskipun biaya hidup lebih murah, ketimpangan ekonomi masih tinggi dan memperbesar jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, perbandingan data ini memperkuat pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam memahami kemiskinan, termasuk aspek spasial dan struktural, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, 2014-2024  
Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

#### 4.2 Pembahasan

Tingkat kemiskinan yang lebih rendah di Kota Surakarta dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan efektivitas relatif program-program yang dijalankan oleh pemerintah kota dalam menanggulangi kemiskinan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, Surakarta masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, yang menandakan masih terdapat tantangan struktural dan sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan inklusif, hal ini menuntut evaluasi terhadap capaian program agar selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Menurut teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan, melainkan juga dengan memperluas kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting agar individu memiliki kapabilitas untuk memilih dan bertindak sesuai dengan nilai dan aspirasi hidup mereka. Program pemberdayaan di Surakarta perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal untuk memastikan masyarakat miskin dapat mengakses kesempatan yang adil dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.

Selain itu, teori partisipatif pembangunan yang dikemukakan oleh Chambers (1997) menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan. Partisipasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas program, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat miskin dalam setiap tahapan program pemberdayaan harus ditingkatkan untuk memastikan intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Meski angka kemiskinan di Surakarta mengalami penurunan, keberlanjutan hasil ini sangat tergantung pada integrasi antar sektor, baik dari pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, maupun dunia usaha. Sinergi lintas sektor dapat memperluas cakupan program dan meningkatkan efisiensi dalam pemberian bantuan, pelatihan keterampilan, hingga akses permodalan. Studi oleh Putri dan Wahyuni (2021) menyebutkan bahwa kolaborasi multi-aktor merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Pendidikan juga memainkan peran krusial dalam memutus rantai kemiskinan. Program pemberdayaan yang menyertakan pelatihan vokasional, literasi keuangan, dan kewirausahaan akan memberikan nilai tambah yang besar. Menurut Rizki dan Nurhayati (2022), peningkatan kompetensi sumber daya manusia terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin secara signifikan dalam jangka menengah.

Di sisi lain, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, perumahan yang layak, dan transportasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ketimpangan dalam distribusi layanan ini berkontribusi besar terhadap eksklusi sosial masyarakat miskin. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Sebagaimana dijelaskan oleh Kusuma et al. (2023), pendekatan multisektoral dalam penanganan kemiskinan lebih efektif karena mampu menjangkau akar penyebab secara komprehensif.

Keberhasilan program pemberdayaan diukur bukan hanya dari turunnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, indikator seperti peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kebahagiaan, dan tingkat pengangguran terbuka juga harus menjadi bagian dari evaluasi program. Dengan pendekatan tersebut, hasil pembangunan tidak hanya bersifat statistik tetapi juga nyata dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu tantangan besar adalah ketidaksesuaian antara desain program dengan kondisi riil di lapangan. Program yang bersifat *top-down* cenderung mengabaikan konteks sosial dan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) yang memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif dan inovasi masyarakat lokal dalam merancang solusi bagi masalah kemiskinan yang mereka hadapi.

Pemerintah Kota Surakarta telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan UMKM, bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan program padat karya. Namun, agar program-program ini dapat menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis bukti yang kuat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan analisis data sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya, untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif, pemerintah tidak hanya perlu fokus pada aspek kuantitatif seperti jumlah penerima manfaat, tetapi juga pada kualitas transformasi sosial yang terjadi. Melalui peningkatan kapabilitas, partisipasi aktif, serta kolaborasi lintas sektor, masyarakat miskin di Surakarta diharapkan tidak hanya keluar dari kemiskinan secara statistik, tetapi juga memiliki posisi setara dalam pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan.

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin yang dijalankan di Kota Surakarta telah memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun belum cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta. Penurunan ini belum mencerminkan keberhasilan secara substantif karena masih terbatas pada bantuan ekonomi dan belum sepenuhnya mengembangkan kapasitas individu sebagaimana ditekankan dalam pendekatan capability Amartya Sen. Beberapa hambatan utama dalam implementasi program meliputi lemahnya sistem pendampingan, kurangnya koordinasi antar OPD, serta keterbatasan data yang akurat dan terkini. Keberhasilan pemberdayaan sejati memerlukan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan partisipatif agar masyarakat miskin tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan.

Pemerintah Kota Surakarta disarankan untuk mengadopsi pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat miskin dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil perlu dioptimalkan agar program pemberdayaan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai, sistem pemantauan yang terintegrasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkeadilan.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aris selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan konstruktif, dan motivasi yang tiada henti selama proses penelitian ini berlangsung. Dukungan intelektual dan bimbingan beliau telah menjadi fondasi penting dalam merumuskan konsep, analisis, dan penyusunan hasil penelitian ini. Kesabaran dan dedikasi beliau dalam membimbing telah membuka wawasan penulis terhadap pendekatan-pendekatan ilmiah yang lebih tajam dan bermakna.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, kerja sama, serta bantuan teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan penelitian. Kehadiran dan kontribusi teman-teman sangat berarti, terutama dalam proses pengumpulan data, diskusi ilmiah, serta berbagai dinamika lapangan yang membutuhkan kerja sama tim yang solid. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Kota Surakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data serta informasi penting yang sangat berharga bagi kelengkapan dan validitas penelitian ini.

Secara khusus, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Ketulusan mereka dalam memberikan dukungan, baik secara emosional maupun spiritual, menjadi sumber kekuatan utama yang memungkinkan penulis menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas. Semoga karya ini dapat menjadi bentuk kecil dari balas budi atas segala pengorbanan dan cinta yang tak ternilai.

#### **F. Referensi**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Kemiskinan Kota Surakarta 2024*. <https://surakartakota.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2025). *Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta 2024*. <https://jakarta.bps.go.id>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2024*. <https://jateng.bps.go.id>
- Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta (BRIDA). (2022). *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Kota Surakarta*. <https://brida.surakarta.go.id>
- Bappeda Surakarta. (2022). *Sinkronisasi Data Kemiskinan dengan Program OPD*. <https://radarsolo.jawapos.com>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Nugroho, H. (2020). Kemiskinan sebagai pelanggaran HAM: Perspektif keadilan sosial. *Jurnal HAM*, 11(2), 145–162.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2020). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Handayani, P. W., Putri, D. P., & Rachmadi, D. (2021). Digital transformation in smart city poverty reduction programs. *Journal of Urban Development Studies*, 15(2), 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.juds.2021.05.002>
- Kompas.com. (2022). *Program BSPS untuk Pengentasan Kemiskinan di Surakarta*. <https://kompas.com>
- Kompas.com. (2025). *Strategi Tekan Angka Kemiskinan di Solo*. <https://regional.kompas.com>
- Kurniawan, B. (2021). Inklusi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 3(1), 88–104.
- Kusuma, R. D., Hartati, R. S., & Lestari, S. (2023). Integrated poverty alleviation model: A multisectoral approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 1–14. <https://doi.org/10.22219/jep.v24i1.12345>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugroho, H., Wulandari, T., & Prasetya, A. (2023). Community-based poverty alleviation: Participatory approach in urban Indonesia. *Indonesian Journal of Social Development*, 9(1), 47–62.
- Nurhidayat, A. (2022). Pemberdayaan ekonomi mikro melalui dana zakat di Surakarta. *Proceeding NCMAHEA*.
- Putri, A. I., & Ahmad, F. (2020). Local government strategies in poverty reduction through community empowerment programs. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 134–146.
- Putri, A. S., & Wahyuni, R. D. (2021). Peran kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Studi kasus di Surakarta. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 103–116.
- Rizki, F. A., & Nurhayati, S. (2022). Pengaruh pelatihan keterampilan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*, 8(3), 87–98.
- Sari, K., & Widodo, T. (2021). Policy coordination and data integration in poverty alleviation. *Journal of Governance and Development*, 17(1), 89–103.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Suryani, I., Hidayat, M., & Dewi, T. (2021). Penerapan metode rappoverty dalam evaluasi program penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(3), 211–225.
- Wulandari, S. (2023). Evaluasi kinerja program pemberdayaan OPD Kota Surakarta dengan model CIPP. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Yuliani, D., & Prasetyo, H. (2022). Pemberdayaan UMKM sebagai strategi pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan Daerah*, 7(3), 56–70.